



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. Poros Kasipute Rarowatu No. .. Telp ..... Kode Pos 93771  
Website : [www.bombanakab.go.id](http://www.bombanakab.go.id), email : [kesbangbbombana@yahoo.co.id](mailto:kesbangbbombana@yahoo.co.id)

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BOMBANA**

**NOMOR 010 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BOMBANA  
TAHUN 2023-2026**

**KEPALA BADAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pejabat tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339)

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
15. Peraturan Bupati Bombana Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;
16. Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
17. Peraturan Bupati Bombana Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana;
18. Peraturan Bupati Bombana Nomor 66 Tahun 2022 tentang Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk :

- a. penyusunan rencana jangka menengah;
- b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. pengukuran kinerja;

- e. penyusunan laporan kinerja;
- f. evaluasi pencapaian kinerja; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 02 Januari 2023

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK  
KABUPATEN BOMBANA,**



**dr. H. SUNANDAR., MM. Kes**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19690716 200003 1 004

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN BOMBANA  
 NOMOR : 010 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 02 JANUARI 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN  
 BOMBANA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN BOMBANA  
 TAHUN 2023-2026**

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Mewujudkan Pelayanan Bersih dan Akuntabel	Peningkatan nilai Predikat Sakip OPD	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat tentang Kehidupan Berdemokrasi	Indeks Demokrasi Lokal	Nilai	Indeks Kebebasan sipil + Indeks Pemenuhan Hak Politik + Indeks Lembaga Lembaga : 3
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Bombana	Hasil Evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Oleh Inspektorat Daerah Kab.Bombana	Nilai	Nilai SAKIP oleh Inspektorat Daerah

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN BOMBANA,**



**Dr. H. SUNANDAR., MM. Kes**  
 Pembina Utama Muda, IV/c  
 NIP. 19690716 200003 1 004